

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Alder, John. Constitutions and Administrative Law. (London: The Macmillan Press LTD. 1989).
- Ali, Hatta. Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia. (Depok: Raja Grafindo Persada. 2014).
- Andrews, William G.. Constitutions and Constitutionalism 3rd edition. (New Jersey: Van Nostrand Company. 1968).
- Arifin, Firmansyah dkk. (Tim Peneliti). Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. (Jakarta: KRHN bekerjasama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan USAID. 2005).
- Arumanadi, Bambang dan Sunarto. Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945. (Semarang: IKIP Semarang Press. 1990).
- Asrun, A. Muhammad. Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto. (Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM). 2004).
- Asshiddiqie, Jimly. Komentar Atas UUD Tahun 1945. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009).
- _____, Jimly. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif baru tentang rule of law and rule of ethics & constitutional law and constitutional ethics. (Jakarta: Sinar Grafika. 2015).
- _____, Jimly. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. (Jakarta: Sinar Grafika. 2016).
- Azhary. Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya. (Jakarta: UI Press. 1995).
- Bell, John. Judiciaries Within Europe. A Comparative Perspective. (Cambridge: Cambridge University Press. 2006).
- Drobak, John N.. ed. Norms and The Law. (New York: Cambridge University. 2006).
- Fadjar, A. Mukthie. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006).
- Faiz, Elza dkk. Risalah Komisi Yudisial: Cikal Bakal. Pelembagaan. dan Dinamika Wewenang. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2013).

- Fajar, Abdul Mukhti. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006).
- Fitriana, Iyan. Pola Relasi Komisi Yudisial Dengan Lembaga Negara. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010).
- Gaffar, Janedjri M. Kedudukan, Fungsi, dan Peran MK dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2009).
- _____, Janedri M. Politik Hukum Pemilu. (Jakarta: Konpres. 2012).
- Gautama, Sudargo. Pengertian Tentang Negara Hukum. (Bandung: Alumni. 1973).
- Gunawan, Opi dan Kristian. Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila. (Bandung: Refika Aditama. 2015).
- Hakim, Abdul Aziz. Negara Hukum dan Demokrasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001).
- Hamilton, Walton H.. Constitutionalism. Encyclopedia of Social Sciences. Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson. eds.. (New York: Macmillian. 1931).
- Harijanti, Susi Dwi. “Pengaturan dan Penyelesaian Pelanggaran Etika pada Masa Reformasi”. dalam Komisi Yudisial. Menggagas Peradilan Etik di Indonesia. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2015).
- Harr, J. Scott dan Karen M. Hess. Constitutional Law and the Criminal Justice System. (Wadsworth: Thomson Learning. 2002).
- Hr, Ridwan. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. (Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2011).
- Huda, Ni'matul. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. (Yogyakarta: FH UII Press. 2011).
- _____, Ni'matul. Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan. (Yogyakarta: FH UII Press. 2014).
- _____, Ni'matul. Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi. (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2018).
- Indrayana, Denny. Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan. (Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2008).
- Joeniarto. Negara Hukum. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada. 1968).
- Kansil, C.S.T.. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka. 1989).

- Kelsen, Hans. General Theory Law and State. (New York: Russell & Russell. 1961).
- Locke, John. Two Treatises of Civil Government. (London: J.M. Dent & Sons. 1960).
- Mahkamah Agung. Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI. (Jakarta: Leip-MA. 2003).
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. (Bandung: Alumni. 1997).
- _____, Bagir. "Memberantas KKN di Lingkungan Peradilan". Makalah Seminar Nasional yang diselenggarakan HALTI kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. 31 Januari 2001.
- _____, Bagir. Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung. 1995).
- _____, Bagir. Menegakkan Hukum Suatu Pencarian. (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia. 2009).
- Marzuki, Laica. Berjalan-Jalan di Ranah Hukum. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana. 2008).
- Meny, Yves dan Andrew Knapp. Government and Politic in Western Europe: Britain. France. Italy. Germany. 3 edition. (Oxford: Oxford University Press. 1998).
- Montesquieu. The Spirit of Laws. Terjemahan oleh M. Khoiril Anam. Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. (Bandung: Nusa Media. 2007).
- Nuh, Muhamad. Etika Profesi Hukum. (Bandung: Pustaka Setia. 2011).
- Palguna, I Dewa Gede. Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain. (Jakarta: Konstitusi Press. 2018).
- _____, I Dewa Gede. Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013).
- Presetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi. Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila. (Bandung: Nusa Media. 2014).
- Priyono, B. Herry. Menggeledah Naluri: Perihal Ekonomi sebagai Kecelakaan Filsafat Politik dalam Manusia. Teka-Teki yang Mencari Solusi (ed). dalam. A. Setyo Wibowo. (Yogyakarta: Kanisius. 2009).
- Rahardjo, Satjipto. Mendudukan Undang-Undang Dasar; Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2007).

- _____, Satjipto. Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. (Jogjakarta: Genta Publishing. 2009).
- Saleh, Imam Anshori. Konsep Pengawasan Hakim. (Jakarta: Setara Press. 2014).
- Saputra, Fandi. “Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi I. Volume 1. 2013.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. Metodologi Penelitian. (Bandung: CV Mandar Maju. 2002).
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010).
- Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012).
- Sirajuddin dan Zulkarnain. Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). (Jakarta: Rajawali Pers. 2001).
- _____, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2008).
- Syahuri, Taufiqurrohman. “Penegakan Etik Hakim oleh Komisi Yudisial”. dalam dalam Komisi Yudisial. Menggagas Peradilan Etik di Indonesia. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 2015).
- Tamanaha, Brian Z.. On the Rule of Law, History, Politics, Theory. (Cambridge: Cambridge University Press. 2004).
- Tannenbaum, Arnold S. Control in Orgaizations: Individual Adjustment and Organizational Performance. *Administrative Science Quartely*. Dikutip dalam A’an Effendi & Freddy Poernomo. Hukum Administrasi. (Jakarta: Sinar Grafika. 2017).
- Wijoyanto, Bambang. “Komisi Yudisial: *Checks and Balances* dan Urgensi Kewenangan Pengawasan”. *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2006).
- Wiryanto. Etik Hakim Konstitusi. (Depok: RajaGrafindo Persada. 2019).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PUTUSAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-IX/2014 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

JURNAL/ARTIKEL:

Abdullah, Mustafa. "Fungsi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat dan Profesional". *Buletin KY*. Vol. II No 2-Oktober. 2007.

- Aliansi Strategis (LIPI-LSM-Universitas) kerjasama Hanns Seidel Foundation. Prosiding Hasil Rapat Pokja & Semiloka Amandemen UUD 1945. (Malang: Kompilasi A. Mukthie Fadjar. Agustus. 2000).
- Bactiar. "Esensi Paham Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 6 No. 1. Maret 2016.
- Efendi, Syafnil. "Konstitutionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah". *Jurnal Humanlis* Vol. 10 No. 1. 2011.
- Hardani, Ayuk dan Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU XVI/2018 Menurut Sistem Hukum Di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*. Volume 1. Nomor 2. 2019.
- Illiyyina, Umi. "Pasang Surut Komisi Yudisial: Kreasi. Resistensi. dan Restorasi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8. No. 3. Juni. 2011.
- Kapitan, Rian Van Frits. "Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 44. Nomor 4. Oktober. 2015.
- Konradus, Danggur. "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi". *Jurnal fakultas Hukum Universitas Diponegoro Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 45 Nomor 3. Juli. 2016.
- Malik, Abdul. "Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6. No.3. 2008.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 6 Nomor 2. Maret. 2017.
- Martitah. "Progresivitas Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislature)." *Jurnal Hukum Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 41. Nomor 2. April. 2012.
- Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso. "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013". *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 2. Juni 2017.
- Suharyanto, B. "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 13. No.1. 2016.
- Sorik, Sutan. Mirza Nasution dan Nazaruddin. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)". *Jurnal Konstitusi*. Volume 15. Nomor 3. September. 2018.

Sudarsono dan Ign. Haryanto. "Hancurnya Ide Negara Hukum Daniel Lev". *Forum Keadilan*. No. 26/III. 13 April 1995.

Wiryanto. "Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*. Volume 13. Nomor 4. Desember. 2016.

TESIS/DISERTASI:

Wiryanto. Rekonstruksi Pengawasan Etik Terhadap Hakim Konstitusi. (Malang: Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017).

SEMINAR/PIDATO/DISKUSI:

Asshiddiqie, Jimly. Sambutan disampaikan pada acara Deklarasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. (Jakarta, 17 Oktober 2005).

Chatamarrasyid, Ais. Seminar: "Pola Rekrutmen dan Pembinaan Karier Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum". BPHN bekerjasama dengan FH UNSRI dan Kanwil Dephukham Prop. Sumatera Selatan. (Palembang, 3-4 April. 2007).

Hidayat, Arief. Seminar: "Dinamika Demokrasi Dalam Pemilu Serentak dan Keutuhan Bangsa." Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. (Semarang, 12 November, 2018).

Soemantri, Sri. "Lembaga Negara dan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945". Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum "Penataan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan" (Departemen Hukum dan HAM RI. Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni. 2007).

INTERNET:

Isra, Saldi. Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 (Isi, implikasi, dan masa depan Komisi Yudisial) dalam <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html>. diakses pada tanggal 14 Desember 2019.

Mahkamah Konstitusi. Sejarah dan Pembentukan. Kedudukan. Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi. diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WifuFFWWbIU>. diakses pada tanggal 12 November 2019.